

BAB III

SEJARAH PENGELOLAAN ARSIP KONVENSIONAL SURAT

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU

A. Sejarah Pengelolaan Arsip Konvensional Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Pada Masa Kantor Arsip Daerah (1993-2008)

Pengelolaan arsip Surat Keputusan (SK) Gubernur dalam format konvensional merupakan fondasi awal sekaligus alasan utama lahirnya kebutuhan transformasi digital. Pada periode ini, penyelamatan arsip vital yang diamanatkan undang-undang dilakukan melalui sistem kearsipan fisik yang dipengaruhi oleh dinamika politik dan kelembagaan.¹

Periode 1993 hingga 2008 menjadi fase akumulasi arsip yang sangat besar di bawah naungan Kantor Arsip Daerah. Perjalanan lembaga kearsipan di Bengkulu dipimpin oleh tokoh-tokoh yang bertanggung jawab mengelola tumpukan berkas daerah yang terus bertambah. Hingga pada tahun 2009, terjadi perubahan besar melalui penggabungan beberapa wadah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, di mana Kantor Arsip Daerah disatukan dengan Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu.

Pengelolaan kearsipan di Provinsi Bengkulu merupakan proses perkembangan administrasi daerah yang berjalan seiring dengan dinamika struktur pemerintahan. Sejak pembentukannya, Kantor Arsip Daerah berfungsi sebagai unit pengelola dokumen melalui berbagai tahap transisi manajemen. Fase ini menjadi fondasi awal perlakuan dokumen daerah

¹Observasi Lapangan, Gedung depo arsip statis Surat Keputusan Gubernur Bengkulu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, 12 Desember 2025.

sebagai aset berharga, meskipun masih menggunakan metode yang sangat sederhana.² Berikut adalah uraian mengenai fase pengelolaan arsip berdasarkan periode kepemimpinan yang pernah berjalan:

1. Tahun 1993-1994

Pengelolaan arsip di Provinsi Bengkulu dimulai pada tahun 1993 di bawah kepemimpinan Drs. Ahmad Solihin sebagai Kepala Kantor Arsip Daerah (Arda) pertama. Pembentukan lembaga ini disahkan oleh Gubernur Drs. H.A. Razie Jachya sebagai tindak lanjut atas kebijakan kearsipan nasional.³ Pada fase perintisan ini, kepemimpinan Ahmad Solihin berfokus pada implementasi amanat undang-undang terkait pedoman tata kelola kearsipan daerah, yang saat itu masih sangat dipengaruhi oleh sistem administrasi sentralistik era Orde Baru.⁴

Di bawah kebijakan Gubernur Drs. H.A. Razie Jachya, perhatian pemerintah daerah masih terbatas pada penyusunan struktur keorganisasian, di mana arsip cenderung dipandang sebagai instrumen birokrasi dan rahasia negara yang bersifat kaku serta tertutup.⁵

²Observasi Lapangan, Gedung depo arsip statis Surat Keputusan Gubernur Bengkulu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, 12 Desember 2025.

³Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 1992 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Provinsi Tingkat I Bengkulu, 4 Mei 1992, dalam berkas *Pembentukan Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Tahun 1993*.

⁴Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, ditetapkan pada 14 November 1992 di Bengkulu, dalam berkas *Pembentukan Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Tahun 1993*.

⁵Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, ditetapkan pada 14 November

Langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan dokumen-dokumen inaktif yang masa berlakunya telah habis dari berbagai biro di Sekretariat Daerah. Dokumen yang diambil ke Kantor Arsip Daerah difokuskan pada berkas yang telah melewati masa aktif selama 2 hingga 3 tahun dan masa inaktif sekitar 10 tahun di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) asal. Sebagai contoh, arsip Surat Keputusan tahun 1982 yang telah berusia 11 tahun mulai ditarik dan dikumpulkan ke Kantor Arsip Daerah pada tahun 1993.⁶

Proses pengelolaan dokumen pada periode ini masih dilakukan secara manual dan tradisional. Setiap surat keputusan gubernur dicatat langsung menggunakan tulisan tangan di dalam buku agenda besar. Keterbatasan infrastruktur juga menjadi hambatan utama karena belum tersedia depo arsip yang memenuhi standar preservasi kearsipan. Akibatnya, seluruh dokumen vital tersebut hanya disimpan dan ditumpuk pada rak-rak kayu sederhana tanpa adanya sistem kontrol suhu serta kelembapan yang memadai.⁷

1992 di Bengkulu, dalam berkas *Pembentukan Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Tahun 1993*.

⁶Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu, *Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 188.820/55 Tahun 1982 tentang Permohonan Pindah Atas Nama Rusli Khair*, (Bengkulu: Depo Arsip Statis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, 1982).

⁷Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, ditetapkan pada 14 November 1992 di Bengkulu, dalam berkas *Pembentukan Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Tahun 1993*.

2. Tahun 1994-2001

Masa kepemimpinan Bapak Muhammad Jafri D. pada tahun 1994–2001 menjadi periode terpanjang dalam sejarah Kantor Arsip Daerah, sekaligus mencatat akumulasi fisik berkas arsip terbesar. Pada masa ini, lembaga bertindak sebagai unit penyelamat dokumen yang telah lama mengendap di berbagai unit kerja. Pengelolaan arsip saat itu masih sangat sederhana, yaitu menggunakan buku agenda besar dan rak kayu tanpa adanya sistem kontrol suhu ruangan, meskipun arsip tersebut kini berstatus sebagai memori kolektif yang tertutup.⁸

Masa jabatan Muhammad Jafri yang panjang melintasi dua periode kepemimpinan daerah. Pertama, era Gubernur Drs. Adjis Ahmad (1994–1999) yang kearsipannya sangat dipengaruhi oleh budaya birokrasi Orde Baru yang kaku dan sentralistik. Pengelolaan arsip dilakukan dengan semangat administrasi yang tertib dan berpusat di satu titik. Bukti perhatian gubernur terlihat dari banyaknya surat keputusan yang dikeluarkan terkait program nasional, seperti Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Kebijakan pusat ini menjadi penyumbang volume arsip yang luar biasa besar karena setiap penunjukan

⁸Ibu Yohana (65 tahun) Pensiunan Kasi Pengelolaan Arsip Statis BPAD dan Staf DPK Provinsi Bengkulu, Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13 Januari 2026, Pukul 10:00 WIB di Perum Pebabri Kota Bengkulu.

penatar hingga peserta di daerah harus melalui SK Gubernur.⁹

Hal ini dikonfirmasi oleh Ibu Puryanti dalam wawancara:

“Kalau ditanya soal itu, yang paling kuat pengaruhnya tuh program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) zamannya Pak Harto dulu. Itu SK-nya banyak sekali karena setiap penunjukan penatar atau peserta itu pakai SK Gubernur.”¹⁰

Kedua, masa transisi Reformasi di bawah Gubernur Drs. H. Hasan Zen, SH (1999–2004). Pada era ini, pengelolaan arsip mulai menghadapi tantangan peralihan dari sistem sentralistik menuju sistem yang lebih terbuka. Namun, proses tersebut terhambat oleh infrastruktur yang belum memadai. Pada periode transisi ini pula, arsip-arsip dari tahun 1980-an sudah memasuki tahap akhir masa inaktif dan mulai mengalami kerusakan fisik karena belum adanya kebijakan perawatan berkas yang nyata di lapangan. Bapak Andre Mukti menggambarkan kondisi fisik berkas lama yang sangat rentan. Setiap terjadi pergeseran program dari pemerintah pusat, ribuan surat keputusan baru diterbitkan sehingga memaksa para arsiparis bekerja ekstra keras untuk menjilid dokumen menggunakan kertas tipis. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara berikut:

“Kalau Mas lihat arsip kita yang tahun 80-an, itu masih tradisional sekali. Penomoran dan pencatatannya masih pakai buku besar, tulisan

⁹Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu, *Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Penunjukan Tim Penatar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Provinsi Bengkulu*, Koleksi SK Gubernur Bengkulu Tahun 1994–1997, Depo Arsip Statis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, 1995.

¹⁰Ibu Puryanti (52 tahun) Pensiunan Staf Bidang Pengelolaan Arsip DPK Provinsi Bengkulu, Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 11 Desember 2025, Pukul 09:00 WIB di Bidang Pengelolaan Arsip DPK Provinsi Bengkulu.

tangan atau mesin tik manual itu. Kertasnya juga khas, pakai kertas doorslag tipis yang kalau kita salah pegang sedikit bisa sobek.”¹¹

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media fisik yang rentan dan sistem pencatatan manual tidak lagi memadai untuk menampung lonjakan volume berkas dari Sekretariat Daerah maupun OPD. Ketidakmampuan sistem konvensional ini memicu inefisiensi administrasi serta penumpukan dokumen. Akibatnya, ribuan berkas dari periode ini menumpuk dan di kemudian hari harus dipilah ulang serta dinilai kembali untuk ditetapkan sebagai arsip statis

3. Tahun 2001-2005

Kepemimpinan Ibu Dra. Hj. Trimurti (2001–2005) berlangsung pada masa jabatan Gubernur Drs. H. Hasan Zen, SH dan awal masa kepemimpinan Gubernur Agusrin M. Najamuddin. Periode ini ditandai dengan implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang mengubah struktur birokrasi secara cepat.¹²

Berbeda dengan era sebelumnya yang bersifat sentralistik, corak kepemimpinan Ibu Trimurti berfokus pada adaptasi terhadap keragaman jenis informasi arsip baru. Surat Keputusan (SK) Gubernur pada masa ini tidak lagi hanya berorientasi pada

¹¹Bapak Andre Mukti (43 tahun) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Arsip DPK Provinsi Bengkulu, Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 31 Desember 2025, Pukul 14:00 WIB di Bidang Pengelolaan Arsip DPK Provinsi Bengkulu.

¹²Ibu Yohana (65 tahun) Pensiunan Kasi Pengelolaan Arsip Statis BPAD dan Staf DPK Provinsi Bengkulu, Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13 Januari 2026, Pukul 10:00 WIB di Perum Pebabri Kota Bengkulu.

kebijakan pusat, melainkan mulai mencerminkan kebutuhan spesifik pembangunan daerah.¹³

Di bawah kepemimpinan Gubernur Hasan Zen, tantangan terbesar birokrasi adalah penataan daerah baru. Gubernur menerbitkan kebijakan tentang penyusunan ulang struktur organisasi yang memicu lonjakan jenis dan volume berkas.¹⁴ Namun, kebijakan desentralisasi ini tidak diimbangi dengan perhatian terhadap infrastruktur depo penyimpanan. Peran lembaga kearsipan masih dipandang sebagai fungsi pendukung sekunder, sehingga alokasi anggaran tetap terbatas dan kondisi ruang penyimpanan memprihatinkan.

Akumulasi beban kerja menjadi masalah akut karena sistem kearsipan belum siap menghadapi arus dokumen dari organisasi perangkat daerah yang baru terbentuk. Meskipun penggunaan komputer sederhana mulai diperkenalkan untuk membantu pengetikan daftar arsip, sistem temu kembali tetap bersandar pada pencarian fisik di gudang. Akibatnya, waktu pelayanan pencarian dokumen menjadi lambat seiring bertambahnya tumpukan berkas. Kendala teknis ini dikonfirmasi oleh Ibu Yohana dalam wawancara berikut:

“Masalahnya, kalau mau cari berkas, ya tetap harus lari ke gudang. Nyarinya manual di tumpukan karung atau rak. Jadi kalau ditanya layanan cepat, ya jujur saja waktu itu kita agak lambat karena

¹³Ibu Yohana (65 tahun) Pensiunan Kasi Pengelolaan Arsip Statis BPAD dan Staf DPK Provinsi Bengkulu, Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13 Januari 2026, Pukul 10:00 WIB di Perum Pebabri Kota Bengkulu.

barangnya memang banyak sekali, sementara sistem carinya masih tradisional.”¹⁵

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ketergantungan pada pencarian fisik di gudang menjadi penyebab utama lambatnya pelayanan arsip. Ketiadaan sistem indeks digital dan terbatasnya sarana penyimpanan membuat proses penemuan kembali berkas memerlukan waktu lama. Keterlambatan operasional ini pada akhirnya menghambat efisiensi administrasi dan kecepatan pengambilan keputusan di lingkungan birokrasi daerah.

4. Tahun 2005- 2006

Periode kepemimpinan Bapak Drs. Ali Usman Pada 2005-2006 merupakan masa transisi pendek yang diwarnai oleh penguatan peran daerah dalam administrasi kepegawaian. Pada masa ini, volume arsip statis dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) mulai mengalir deras ke Kantor Arsip Daerah, menyebabkan krisis ruang simpan yang serius. Depo arsip mulai penuh sesak, dan perlakuan terhadap dokumen tetap dilakukan secara manual tanpa adanya inovasi teknologi yang signifikan.

Kekhawatiran akan degradasi material mulai muncul, terutama pada dokumen peninggalan awal tahun 1950-an yang mulai menunjukkan tanda-tanda pelapukan kimiawi akibat kondisi lingkungan penyimpanan yang mulai tidak ideal karena

¹⁵Ibu Yohana (65 tahun) Pensiunan Kasi Pengelolaan Arsip Statis BPAD dan Staf DPK Provinsi Bengkulu, Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13 Januari 2026, Pukul 10:00 WIB di Perum Pebabri Kota Bengkulu.

kepadatan dokumen yang luar biasa. Khusus pada arsip 1982-an lebih cepat terjadi kerusakan dikarenakan pengelolaan yang terbatas. Ibu Yohana menggambarkan bagaimana pengelolaan di Kantor Arsip Daerah saat itu dalam wawancara yaitu,

“.....Saya ingat, berkas-berkas tahun 80-an itu sudah mulai bau asam, kertasnya jadi rapuh kalau dipegang karena sirkulasi udara di gudang kita kurang bagus.”¹⁶

Berdasarkan wawancara sudah jelas bahwa pengelolaan yang terbatas ditambah lingkungan fisik Gedung Kantor Arsip Daerah yang tidak berstandar menyebabkan kerusakan berkas arsip itu sendiri.

5. Tahun 2006-2007

Masa kepemimpinan Ibu Teti Nurdianti berlangsung cukup singkat, yaitu dari Agustus 2006 hingga Januari 2007 sebelum digantikan oleh Bapak Tarmizi. Pada periode ini, permasalahan menahun di Kantor Arsip Daerah belum dapat terselesaikan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas bangunan dan kurangnya kompetensi pegawai dalam mengelola fisik arsip yang sudah mulai mengalami kerusakan. Permasalahan tersebut bermuara pada terbatasnya anggaran daerah karena lembaga kearsipan hanya berfungsi sebagai unit penunjang, bukan lembaga pokok seperti Dinas Pekerjaan Umum dan

¹⁶Ibu Yohana (65 tahun) Pensiunan Kasi Pengelolaan Arsip Statis BPAD dan Staf DPK Provinsi Bengkulu, Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13 Januari 2026, Pukul 10:00 WIB di Perum Pebabri Kota Bengkulu.

Perumahan Rakyat (PUPR) yang memiliki fungsi penting dalam pembangunan fisik.¹⁷

Minimnya anggaran kearsipan merupakan dampak dari kebijakan anggaran pemerintah daerah yang menitikberatkan pada sektor dengan orientasi hasil fisik konkret. Pemerintah cenderung memprioritaskan alokasi dana untuk sektor kesehatan dan infrastruktur karena manfaatnya langsung terukur oleh masyarakat. Sebaliknya, pengelolaan arsip hanya dianggap sebagai aktivitas administratif pasif, sehingga Kantor Arsip Daerah lebih dipandang sebagai gudang penyimpanan kertas daripada pusat data strategis. Hal ini menyebabkan alokasi dana untuk perawatan depo, pengadaan alat konservasi, dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) kearsipan selalu berada di prioritas bawah. Kondisi tersebut dikonfirmasi oleh Ibu Yohana dalam wawancara:

“Tapi ya itu, anggaran untuk kearsipan waktu itu memang kecil sekali. Orang lebih pilih bangun jalan daripada urus kertas. Jadi di akhir masa beliau, kita benar-benar di titik jenuh nyarinya satu surat saja bisa sehari-hari.”¹⁸

Keterbatasan dana ini mengikat lembaga dalam siklus kemunduran di mana teknologi kearsipan tidak dapat diperbarui dan bangunan tetap tidak memenuhi standar suhu serta

¹⁷Ibu Yohana (65 tahun) Pensiunan Kasi Pengelolaan Arsip Statis BPAD dan Staf DPK Provinsi Bengkulu, Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13 Januari 2026, Pukul 10:00 WIB di Perum Pebabri Kota Bengkulu.

¹⁸Ibu Yohana (65 tahun) Pensiunan Kasi Pengelolaan Arsip Statis BPAD dan Staf DPK Provinsi Bengkulu, Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13 Januari 2026, Pukul 10:00 WIB di Perum Pebabri Kota Bengkulu.

kelembapan. Akibatnya, kerusakan fisik pada Surat Keputusan (SK) Gubernur periode 1980-an terus berlanjut tanpa penanganan memadai karena penyelamatan dokumen negara kalah prioritas dengan proyek fisik daerah yang lebih populer secara politis. Selama fungsi kearsipan masih dianggap sebagai urusan sekunder, risiko kehilangan memori kolektif birokrasi di Provinsi Bengkulu akan tetap tinggi.

6. Tahun 2007-2008

Masa kepemimpinan Bapak Tarmizi berlangsung dari Januari 2007 hingga pertengahan 2008, sebelum beliau dimutasi menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Periode ini menandai akhir dari era Kantor Arsip Daerah sebagai lembaga yang berdiri sendiri. Selama menjabat, Bapak Tarmizi bersikap sangat kritis terhadap keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan di Bengkulu. Beliau mencatat bahwa gedung yang digunakan bukanlah depo yang dirancang khusus sesuai standar preservasi, melainkan bangunan alih fungsi dengan sistem kontrol sirkulasi udara yang sangat minim.¹⁹

Kondisi keuangan yang minim untuk perawatan fisik terjadi karena sektor kearsipan sering kali kalah populer dibandingkan dengan sektor pembangunan lainnya. Akibatnya, arsip vital seperti Surat Keputusan (SK) Gubernur menghadapi risiko tinggi mengalami kerusakan akibat jamur dan kelembapan udara.

¹⁹Ibu Yohana (65 tahun) Pensiunan Kasi Pengelolaan Arsip Statis BPAD dan Staf DPK Provinsi Bengkulu, Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13 Januari 2026, Pukul 10:00 WIB di Perum Pebabri Kota Bengkulu.

Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak Tarmizi dalam wawancara berikut:

“Karena bukan gedung yang dirancang khusus untuk depo, sirkulasi udara dan suhu sangat sulit dikontrol secara standar... Ini yang sering menyebabkan kekhawatiran akan terjadinya peristiwa darurat seperti penumpukan luar biasa yang memicu kerusakan alami dokumen.”²⁰

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut kondisi sistem kearsipan konvensional telah mencapai batas kemampuan operasionalnya. Prosedur penelusuran berkas secara manual tidak lagi efektif karena memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga menghambat efisiensi pelayanan administrasi kepegawaian.

Pengelolaan arsip SK Gubernur Bengkulu pada masa Kantor Arsip Daerah (1993–2008) masih bersifat konvensional dengan mengandalkan pencatatan manual dan penyimpanan fisik. Ciri utamanya terlihat pada penggunaan buku agenda, kertas *doorslag*, rak kayu, serta depo penyimpanan yang belum memenuhi standar preservasi. Minimalnya anggaran dan besarnya anggapan bahwa kearsipan hanyalah urusan sekunder menghambat adopsi teknologi serta memperlambat layanan pencarian berkas. Meski demikian, periode ini menjadi fondasi awal yang penting dalam mengumpulkan dan menyelamatkan memori kolektif birokrasi Bengkulu sebelum beralih ke era modernisasi digital.

²⁰Bapak Tarmizi (65 tahun) Mantan Kepala Kantor Arsip Daerah Provinsi Bengkulu, Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 3 Januari 2026, Pukul 15:00 WIB di Kediaman Pribadi Bumi Ayu 4 Kota Bengkulu.

B. Sejarah Pengelolaan Arsip Pada Masa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu (2009-2021)

Pada tahun 2009, terjadi perubahan besar dalam struktur tata kelola kearsipan di Bengkulu melalui penggabungan beberapa unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kantor Arsip Daerah yang awalnya berdiri sendiri disatukan dengan Perpustakaan Daerah dan bagian Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bengkulu.²¹ Penggabungan ini melahirkan instansi baru bernama Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi (BPAD). Langkah ini diambil sebagai strategi penataan organisasi agar urusan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien melalui sistem pelayanan informasi yang terpadu satu pintu.

Dalam perkembangan selanjutnya, perubahan organisasi kembali dilakukan pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016, yang secara resmi mengubah status kelembagaan ini menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu. Perubahan dari bentuk badan menjadi dinas membawa dampak signifikan terhadap pembagian alokasi anggaran serta mekanisme kerja internal.²² Fase ini menuntut adanya strategi baru dalam pengelolaan dokumen negara karena lembaga harus mengintegrasikan dua fungsi pelayanan publik yang memiliki karakter berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai perkembangan pengelolaan arsip pada masa tersebut:

²¹Website DPK Provinsi Bengkulu, Profil,
<https://www.perpustakaankearsipanprovinsibengkulu.com/profil/>. diakses 20
 September 2025 pukul 20:10 WIB

²²Website DPK Provinsi Bengkulu, Profil,
<https://www.perpustakaankearsipanprovinsibengkulu.com/profil/>. diakses 20
 September 2025 pukul 20:10 WIB

1) Tahun 2009-2015

Pada masa kepemimpinan Gubernur Agusrin M. Najamuddin, Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan perubahan signifikan dengan menggabungkan Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Daerah menjadi Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi (BPAD) pada tahun 2009. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan struktur birokrasi. Namun, penggabungan tersebut memunculkan benturan operasional antara layanan perpustakaan yang bersifat umum untuk publik dengan urusan kearsipan yang bersifat teknis dan internal.²³

Saat perubahan struktur ini terjadi, Bidang Pengelolaan Arsip dipimpin oleh Drs. Mukhlis. Fokus utama beliau adalah penyatuan nomenklatur lembaga dan penyesuaian tata kelola kearsipan agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Setelah itu, kepemimpinan daerah beralih kepada Gubernur H. Junaidi Hamsyah, S.Ag., M.Pd. Sebagai langkah maju di bidang regulasi, Gubernur Junaidi Hamsyah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Regulasi ini menjadi instrumen

²³Ibu Yohana (65 tahun) Pensiunan Kasi Pengelolaan Arsip Statis BPAD dan Staf DPK Provinsi Bengkulu, Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13 Januari 2026, Pukul 10:00 WIB di Perum Pebabri Kota Bengkulu.

hukum yang mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyerahkan arsip mereka secara tertib.²⁴

Meskipun regulasi mulai dibenahi, pengelolaan arsip Surat Keputusan Gubernur pada periode ini mengalami krisis operasional akibat sistem penataan yang masih manual. Masalah diperparah oleh kebijakan mutasi yang mengurangi jumlah pegawai kearsipan serta belum rampungnya pembangunan gedung baru. Kondisi berat tersebut digambarkan oleh Ibu Yohana dalam wawancara berikut:

“Nah, ini masa yang paling berat buat saya Waktu gabung jadi Dinas, fokus pimpinan terbagi antara perpustakaan dan arsip. Padahal arsip kita lagi krisis soalnya gedung bagian arsip belum rampung dibangun saat awal 2009 masih banyak arsip yang disimpan juga di kantor lama, tenaga kerja nya juga ngurang karna dimutasi tadi jadi ribet sekali dulu arsip di kantor lama juga baru didatangkan betahap karna tempat yang belum memadai”²⁵

Tantangan operasional di lapangan semakin kompleks akibat rendahnya kesadaran OPD dalam melakukan penyerahan dokumen. Banyak instansi menyerahkan berkas inaktif dalam kondisi tidak teratur tanpa disertai dokumen penyerahan yang sah. Masalah teknis ini diuraikan oleh Bapak Ridwan dalam wawancara:

“Kendala paling besak tuh pas nerimo arsip dari OPD... Kadang wong tuh ngirim arsip cuma pake kardus bae, dak ado daftarnya. Pas kito cek,

²⁴Ibu Yohana (65 tahun) Pensiunan Kasi Pengelolaan Arsip Statis BPAD dan Staf DPK Provinsi Bengkulu, Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13 Januari 2026, Pukul 10:00 WIB di Perum Pebabri Kota Bengkulu.

²⁵Ibu Yohana (65 tahun) Pensiunan Kasi Pengelolaan Arsip Statis BPAD dan Staf DPK Provinsi Bengkulu, Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13 Januari 2026, Pukul 10:00 WIB di Perum Pebabri Kota Bengkulu.

isinyo acak-acakan. Harusnya kan ado BAST samo DAI yang rapi, tapi kenyataannyo kito di kearsipan ini seringlah ngerapike gawe orang lain.”²⁶

Kondisi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi pengelolaan dokumen di tingkat OPD. Untuk mengatasi masalah ini, penempatan tenaga arsiparis di setiap OPD menjadi kebutuhan yang mendesak. Kehadiran tenaga ahli ini penting agar penataan dan penyusunan Daftar Arsip Inaktif (DAI) dapat dilakukan secara sistematis di sumbernya. Dengan demikian, saat dokumen diserahkan ke tingkat provinsi, tidak ada lagi kendala administrasi seperti berkas yang acak-acakan.

Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga ini bertransformasi menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu. Selama masa perkembangan tersebut, dinas dipimpin oleh beberapa pejabat seperti Ibu Ratna Megawati, Bapak Sardi, dan Bapak Ibrahim. Para pimpinan ini harus menghadapi dilema dalam menentukan prioritas program kerja karena adanya dua fungsi pelayanan yang disatukan dalam satu instansi. Mengenai kesenjangan ini, Bapak Tarmizi memberikan kritik dalam wawancara:

“Operasional kearsipan yang sifatnya teknis seringkali kalah populer dibandingkan program perpustakaan yang lebih terlihat publik. Fokus pimpinan pun terasa terbagi, terkadang kebijakan lebih banyak

²⁶Bapak Ridwan (53 tahun) Staf Bidang Pengelolaan Arsip DPK Provinsi Bengkulu, Wawancara dilakukan pada hari Jum'at, 13 Desember 2025, Pukul 08:00 WIB di Bidang Pengelolaan Arsip DPK Provinsi Bengkulu.

berpihak pada pengadaan buku daripada penyelamatan dokumen negara.”²⁷

Dampak nyata dari ketimpangan anggaran ini terlihat pada fasilitas penyimpanan. Ruang yang digunakan oleh bidang kearsipan tetap mengandalkan gedung alih fungsi yang tidak memenuhi spesifikasi teknis depo kearsipan standar. Akibatnya, sistem kontrol suhu dan sirkulasi udara sulit dijalankan, sehingga dokumen-dokumen bernilai guna tinggi di dalamnya terus berada dalam ancaman kerusakan alami akibat tingginya tingkat kelembapan ruangan.

2) Tahun 2015-2021

Pada periode 2015-2021, efektivitas pengelolaan arsip terus ditingkatkan melalui perbaikan sarana utama dan penunjang. Masa kepemimpinan Ibu Ratna Megawati menjadi titik balik munculnya kesadaran akan pentingnya preservasi digital. Meskipun demikian, penanganan terhadap dokumen tahun 1980-an yang mengalami *slow fire* (kerusakan akibat keasaman kertas) belum dapat terlaksana secara maksimal karena belum adanya program restorasi kimiawi yang intensif.²⁸

Corak kepemimpinan beliau lebih diarahkan pada tindakan penyelamatan fisik guna mencegah dokumen hancur total. Pada masa ini, urgensi alih media mulai dirumuskan sebagai solusi

²⁷Bapak Tarmizi (65 tahun) Mantan Kepala Kantor Arsip Daerah Provinsi Bengkulu, Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 3 Januari 2026, Pukul 15:00 WIB di Kediaman Pribadi Bumi Ayu 4 Kota Bengkulu.

²⁸Ibu Puryanti (52 tahun) Staf Bidang Pengelolaan Arsip DPK Provinsi Bengkulu, Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 11 Desember 2025, Pukul 09:00 WIB di Bidang Pengelolaan Arsip DPK Provinsi Bengkulu.

mutlak untuk mengatasi ketergantungan pada penyimpanan fisik tunggal yang memiliki risiko bencana tinggi. Langkah pemilahan, pembersihan, dan penempatan ulang arsip ke dalam boks khusus dilakukan secara masif sebagai tahap persiapan menuju era digitalisasi.²⁹

Di tingkat pemerintah daerah, Gubernur Ridwan Mukti menerbitkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 53 Tahun 2016 yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Regulasi ini menjadi landasan hukum kuat yang menegaskan bahwa bidang kearsipan tidak lagi sekadar menjadi unit penunjang minor, melainkan telah bertransformasi menjadi instansi tipe A dengan tanggung jawab yang lebih besar.

Fase pengelolaan arsip berdasarkan tahun dan pergantian pemimpin menunjukkan bahwa sistem kearsipan yang dominan diterapkan di Bengkulu pada awalnya adalah adaptasi dari sistem tata naskah (Takah) dan registrasi. Sistem konvensional ini mengandalkan pencatatan dokumen secara kronologis menggunakan buku agenda atau kartu kendali. Dalam sejarah kearsipan di Indonesia, sistem Takah dirancang untuk mencatat surat harian.³⁰

²⁹Ibu Puryanti (52 tahun) Staf Bidang Pengelolaan Arsip DPK Provinsi Bengkulu, Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 11 Desember 2025, Pukul 09:00 WIB di Bidang Pengelolaan Arsip DPK Provinsi Bengkulu

³⁰Ibu Puryanti (52 tahun) Staf Bidang Pengelolaan Arsip DPK Provinsi Bengkulu, Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 11 Desember 2025, Pukul 09:00 WIB di Bidang Pengelolaan Arsip DPK Provinsi Bengkulu.

Namun, ketika digunakan untuk mengelola arsip statis kepegawaian yang volumenya diperkirakan mencapai puluhan ribu berkas, sistem ini menjadi tidak efektif karena pencarian arsip tidak dapat dilakukan secara tematik. Kelemahan struktural ini menciptakan krisis inefisiensi layanan yang berlangsung selama puluhan tahun.

Kelemahan sistem registrasi ini menjadi masalah struktural yang akut ketika dihadapkan pada volume data arsip surat keputusan kepegawaian yang mencapai lebih dari 40.000 berkas individu di depo arsip. Data operasional menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan arsiparis untuk menemukan satu berkas individu dapat mencapai 2 hingga 5 hari kerja, atau setara dengan 16 hingga 40 jam kerja efektif. Inefisiensi ini membuktikan kegagalan sistem lama dalam merespons tuntutan kecepatan layanan publik pasca-Reformasi. Oleh karena itu, pengelolaan arsip statis SK Gubernur Provinsi Bengkulu periode 1982 hingga 2015 sangat bergantung pada sistem fisik, yang secara bertahap memicu penurunan kondisi dokumen.³¹

Permasalahan sistemik pada era konvensional ini menjadi alasan terkuat bahwa transformasi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu merupakan keharusan mutlak untuk menjamin ketersediaan akses data. Selain pengaruh pusat, dinamika lokal seperti pemekaran wilayah dan otonomi daerah menjadikan arsip ini sebagai jantung memori pembangunan. Bapak Andre Mukti menekankan urgensi

³¹Observasi Lapangan, Gedung depo arsip statis Surat Keputusan Gubernur Bengkulu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, 12 Desember 2025.

penyelamatan dokumen ini sebagai identitas daerah melalui pandangannya:

“Arsip ini kan memori kita Mas. Kalau SK-SK Gubernur ini hilang, kita kehilangan sejarah pembangunan Bengkulu. Harapan saya ya pemda lebih melek anggaran buat kearsipan. Jangan dianggap gudang tempat pembuangan kertas saja, tapi ini pusat data.”³²

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa arsip merupakan aset berharga yang menyimpan sejarah panjang pemerintahan. Namun, upaya menjadikan kearsipan sebagai pusat data sering kali terbentur pada keterbatasan sistem manual yang mengancam nilai hukum serta autentisitas arsip vital. Urgensi transformasi sistem kearsipan ini dipicu oleh tiga kendala utama. Pertama adalah degradasi fisik material dokumen, di mana arsip kertas produksi tahun 1982 hingga 2015 berada dalam masa kritis akibat kerusakan kimiawi yang dipicu oleh kadar asam tinggi serta kelembapan lingkungan. Kerusakan ini mengakibatkan dokumen menjadi rapuh dan menghadapi risiko kehancuran permanen.³³

Masalah kedua berkaitan dengan tingginya risiko kehilangan data akibat bencana, karena sistem penyimpanan tunggal membuat seluruh dokumen rentan terhadap ancaman banjir, kebakaran, maupun gempa bumi. Dalam kondisi tersebut, pemulihan data pascabencana hampir tidak mungkin dilakukan dengan cepat. Masalah ketiga adalah hambatan akses pelayanan, di mana proses pencarian dokumen secara manual

³²Bapak Andre Mukti (43 tahun) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Arsip DPK Provinsi Bengkulu, Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 31 Desember 2025, Pukul 14:00 WIB di Bidang Pengelolaan Arsip DPK Provinsi Bengkulu.

³³Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

memerlukan waktu lama karena petugas harus memeriksa fisik arsip satu per satu. Kondisi ini memperlambat urusan administratif seperti proses pensiun dan verifikasi kepegawaian, sekaligus meningkatkan risiko kerusakan mekanis akibat dokumen fisik yang terlalu sering disentuh.

